

ETIKA DALAM KEHIDUPAN DI NEGARA DEMOKRASI

Chandra Christofel Wohon¹

¹Universitas Katolik De La Salle Manado, Jl. Kairagi I, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
cwohon@unikadelasalle.ac.id

Article History

Received: 10-01-2024

Revision: 16-01-2024

Accepted: 18-01-2024

Published: 19-01-2024

Abstract. Ethics is important especially in the life of human behavior. Because of the importance of ethics, ethics should be the main concern of every action and behavior of human subjects. In the life of the state, nation and homeland, it is very important to be based on ethics, because that life will always be related to many people or society. This article will talk about ethics and its importance in the life of a state in a democratic country, such as Indonesia. However, Indonesia as a democracy does not only embrace democracy as it is commonly known, but embraces Pancasila democracy. From that description, the author will then elaborate on how Pancasila democracy is a choice of democracy model in a country, which is full of national ethics.

Keywords: National Ethics, State Ethics, Democracy, Pancasila Democracy

Abstrak. Etika adalah hal yang penting terutama dalam kehidupan perilaku manusia. Karena pentingnya etika yang dimaksud, maka etika harus menjadi perhatian utama setiap tindakan dan perilaku subjek manusia. Dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bertanah air, sangat penting untuk berpijak dari etika, karena kehidupan itu akan selalu terkait dengan orang banyak atau masyarakat. Artikel ini akan berbicara tentang etika dan pentingnya etika dalam kehidupan bernegara di negara demokrasi, seperti Indonesia. Kendati demikian, Indonesia sebagai negara demokrasi, bukan hanya menganut demokrasi sebagaimana umum dikenal, tetapi menganut demokrasi Pancasila. Dari uraian itu, kemudian penulis akan menguraikan tentang bagaimana demokrasi Pancasila itu menjadi sebuah pilihan model demokrasi dalam sebuah negara, yang sarat dengan etika berbangsa.

Kata Kunci: Etika Berbangsa, Etika Bernegara, Demokrasi, Demokrasi Pancasila

How to Cite: Wohon, C. C. (2024). Etika dalam Kehidupan di Negara Demokrasi. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (1), 447-456. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i1.794>

PENDAHULUAN

Etika adalah ilmu yang membahas tentang perilaku, tindakan dan cara hidup manusia atau subjek. Etika juga menjadi elemen penting, ketika kita hidup bersama yang lain (baca orang lain). Dalam kerangka ini maka etika tidak pernah bisa diabaikan, kendati kita sedang berada dalam situasi apapun. Sejalan dengan itu, etika ada unsur vital di tengah kehidupan bersama (Suseno, 2016). Saat ini, masyarakat Indonesia disuguhi sebuah fakta bahwa etika berbangsa di negara demokrasi dipertanyakan, seiring perhelatan tahun politik 2024 ini. Maka dari fakta ini, etika berbangsa dan atau bernegara nanti diperbincangkan ketika terjadi pelanggaran etis terutama oleh para penyelenggara sebuah negara. Sebut saja fakta yang paling anyar yakni ketika Mahkamah Konstitusi menyidangkan para pimpinannya, karena diduga melanggar kode

etik dalam hal pengambilan keputusan terhadap batasan usia warga Indonesia yang bisa dicalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, demikian juga, para pasangan calon presiden saat ini terus menerus mempertanyakan kode etik bernegara di negara demokrasi. Sementara itu, hal yang tak kalah menariknya, penulis mengamati bahwa etika saat ini disinyalir semakin merosot bukan karena tidak pentingnya etika ini, melainkan adanya oknum yang secara jelas dipandang telah melanggar etika (Saputra, 2023).

Dari fondasi sebagaimana tersebut diatas, maka penulis melihat berdasarkan pengamatan bahwa kondisi realitas saat ini, tampak mulai mengabaikan etika dalam berdemokrasi, termasuk didalamnya etika berdemokrasi. Maka dari itu, tulisan ini penulsi uraikan gambaran umum situasi realitas terkini di Indonesia, Tentu saja, faktor penting lain akan senantiasa terikat satu dengan yang lainnya karena etika sebagai titik tolak berperilaku atau bertindak. Jadi, pertanyaan sentral penulis adalah bagaimana etika itu bersifat penting di sebuah negara yang menganut demokrasi Pancasila seperti Indonesia? Jawaban atas pertanyaan sentral tersebut diuraikan berawal dari arti penting etika, kemudian dilanjutkan dengan etika bernegara, etika dan demokrasi, dan dilanjutkan dengan demokrasi Pancasila yang dianut oleh Bangsa Indonesia.

METODE

Metode yang penulis gunakan dalam menguraikan artikel ini adalah deskriptif analitis. Diawali dengan uraian secara deskriptif tentang etika, etika bernegara, demokrasi serta demokrasi Pancasila sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Dari dasar ini, kemudian penulis berupaya untuk memberi catatan rekomendasi terkait pentingnya etika bagi negara Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila.

HASIL DAN DISKUSI

Selayang Pandang Etika

Etika adalah ilmu yang mengkaji tentang perilaku/tindakan manusia. Sebagai ilmu yang mengkaji masalah perilaku manusia, maka etika sekurang-kurangnya menunjuk kepada sebuah ‘alat ukur’ tindakan manusia. Singkat kata, etika adalah evaluasi secara kritis pada setiap perilaku atau tindakan moral yang dipraktekkan masyarakat di dalam kehidupannya bersama orang lain atau di masyarakat. Jika kita menilik ke dalam ilmu pengetahuan, etika dianggap sebagai ilmu yang mencari sebuah orientasi. Ilmu yang menjadi pintu masuk untuk membahas tentang persoalan seputar kehidupan manusia dan perilakunya.

Kendati sedemikian penting, apa sebetulnya yang dimaksud dengan etika? Untuk menjawab pertanyaan ini, dari sudut pandang etimologis, kata 'etika' berasal dari kata dalam bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan, adat atau sifat/kelakuan subjek manusia. Juga berarti: Adat, watak dan kesusilaan. Istilah ini dipakai untuk menunjuk ilmu dan prinsip-prinsip dasar penilaian sebuah tindakan, entah baik atau buruk. Jadi etika adalah ilmu yang mampu menjadi alat untuk menguji setiap tindakan manusia dalam hal perilakunya. Adapun untuk objek material etika adalah perilaku manusia sebagai manusia, dan objek formalnya adalah bagaimana baik buruknya tindakan seorang subjek dan atau bagaimana benar salahnya tindakan si subjek itu, berdasarkan norma yang berlaku (Sudarminta, 2013)

Dalam kehidupan nyata saat ini, kita bisa menyaksikan bahwa etika selalu diabaikan atau selalu dikompromikan. Etika menjadi sebuah hal yang seorang tidak vital dalam kehidupan manusia. Bahkan ada pendapat bahwa saat ini terjadi krisis etika. Etika tampak mulai luntur, terutama terkait norma kesopanan yang dipraktikkan kini, bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Etika yang biasanya menjadi evaluasi kritis atas setiap tindakan manusia, kini tidak lagi menjadi hal yang utama atau tidak menjadi patokan utama lagi. Maka dari itu, secara umum etika dapat diartikan sebagai kesediaan manusia untuk mematuhi sebuah peraturan kesusilaan yang berkaitan dengan sifat yang baik atau buruk, juga merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral si subjek. Etika pada akhirnya merupakan ilmu tentang kesusilaan yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip perilaku yang benar tentang bagaimana sepatutnya manusia hidup bermasyarakat (Bertens, 2003)

Di sisi yang sama, kita perlu memahami bahwa etika adalah bidang ilmu pengetahuan yang berefleksi tentang ajaran moral di mana dalam ajaran moral itu terkandung pemiiran yang masuk diakal (rasional), sarat akan kritik dan juga sistematis dan mendasar. Di antara etika dan apa yang dikatakan sebagai ajaran moral sejatinya harus dibedakan. Ajaran moral adalah patokan bagaimana manusia atau subjek hidup dan bertindak demi sebuah kebaikan. Sementara etika adalah evaluasi kritis atau pemikiran kritis terkait hal yang di atas (Gunadi, 2017). Dalam kebiasaan masyarakat tradisional, tampak bahwa etika selalu terkait dengan bagaimana cara manusia atau subjek berpegang pada norma tradisional saja, yang jika kita jeli melihat, didukung oleh nilai-nilai dalam agama. Mereka tidak secara jelas mengaitkan setiap perilaku mereka dengan etika. Namun demikian, di zaman sekarang situasi sudah berubah, semua berpijak dari apa itu etika sebagaimana mestinya, walaupun hal itu tidak dianggap sebagai fondasi utama. Demikianlah terjadi bahwa setiap subjek manusia tentu saja berhadapan dengan berbagai problem kehidupan, namun mereka pada akhirnya berpijak pada norma yang mereka pegang secara ketat, karena menjadi 'pelindung' bagi setiap perilaku atau tindakan mereka.

Oleh karena itu, tak mengherankan apabila di era globalisasi kini, etika sebagai sebuah refleksi etis, semakin diperlukan, untuk membantu subjek dalam bertindak (Neni, 2002).

Sebagai dasar dan fondasi yang kuat, etika juga berkuat dalam hal kebebasan individu dalam kaitan dengan tanggung jawab si subjek itu. Maka di dalamnya terdapat kewajiban yang lekat erat dengan kebebasan itu. Saya bebas untuk menaati suara hati saya, namun apakah saya tidak perlu menunaikan kewajiban? Jika demikian, maka saya sebagai manusia yang bebas memiliki tanggung jawab dalam kebebasan saya. Akhirnya penting untuk diingat bahwa dari fakta ini, setiap subjek harus menyadari dengan rasionalitasnya bahwa ini perlu disadari. Kita juga mengetahui bahwa fondasi dari kebebasan setiap manusia adalah bahwa dia mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menentukan diri (deterministik). Hal ini disebut kebebasan eksistensial yang berakar dari kebebasan rohaniah si subjek itu. Akhirnya perlu ada sebuah kesadaran inti bahwa kebebasan yang bertanggung jawab harus dilakukan secara normatif pula. Oleh karena itu, kita harus sepakat bahwa kebebasan subjek manusia di dalam etika, memiliki karakter normatif (Rici, 2021).

Etika Bernegara & Etika Demokrasi

Etika bernegara perlu dipahami dalam dua konteks yakni etika sosial budaya dan etika politik (RI, 2001). Etika sosial dipandang penting dan perlu karena sangat penting di mana hal itu juga berpijak dari rasa kemanusiaan dengan mendaku sikap jujur, peduli, memahami, menghargai, dkk., di antara sesama manusia dan warga bangsa. Demikian juga perlu ditumbuhkembangkan sebuah sikap budaya malu yakni kesadaran untuk merasa malu ketika berbuat sebuah kekeliruan atau kesalahan yang bertentang dengan norma baik norma moral dalam agama maupun nilai luhur budaya bangsa (RI, 2001). *Kedua*, etika politik dan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, di mana didalamnya juga tumbuh suasana politik yang sungguh-sungguh demokratis dengan ciri terbuka, bertanggung jawab serta tanggap terhadap aspirasi rakyat yang juga ada perbedaan satu dengan lainnya (RI, 2001).

Selanjutnya, melampaui etika bernegara tersebut, kita perlu menelaah tentang etika berdemokrasi. Dalam konteks etika demokrasi, penulis berpijak dari pengertian demokrasi sebagaimana para filsuf Yunani kuno mendefinisinya. Demokrasi adalah Secara harfiah, "demokrasi" berarti "pemerintahan rakyat". Dalam demokrasi Yunani kuno, di mana gagasan demokrasi lahir lebih dari 2.400 tahun yang lalu, warga negara berkumpul bersama di luar ruangan untuk membuat keputusan tentang kebijakan publik. Meskipun saat ini warga negara terkadang berkumpul bersama untuk memutuskan tertentu, mereka biasanya tidak membuat

sebagian besar keputusan sendiri. Sebaliknya, mereka memilih wakil-wakil yang membuat keputusan atas nama mereka. Itulah yang terjadi di sebagian besar pemilihan umum. Kendati demikian, sering terjadi bahwa orang salah mengartikan "demokrasi" sebagai pemilihan umum yang hanya merupakan bagian-bagian penting dari setiap sistem politik yang demokratis. Apa yang kita sebut "demokrasi" itu lebih rumit daripada hanya sekedar berkumpul untuk membuat keputusan atau memberikan suara dalam pemilu. Maka dari itu, telah kita ketahui bersama bahwa demokrasi adalah sistem politik dimana kekuasaan diberikan kepada seseorang atas dasar pilihan mayoritas masyarakat.

Berbanding lurus dengan paham tersebut, sejatinya, konsep Plato tentang sebuah negara yang ideal adalah terkait teori filosofisnya tentang idea. Bagi Plato, tujuan hidup manusia dapat dilihat dari obsesinya terhadap wujud sebuah negara yang teratur, dimana negara yang teratur itu mencakup kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni. Pandangan terhadap negara yang ideal seperti ini, digagas Plato setelah dia melihat sistem pemerintahan di Athena waktu itu tidak stabil. Waktu itu di Athena sering berganti sistem negaranya dari sistem aristokrasi, sistem oligarki dan tentu saja demokrasi, yang sebetulnya cenderung kurang memberikan kepuasan bagi masyarakat waktu itu. Bagi Plato, sistem pemerintahan harus berdasar pada sebuah idea yang tinggi yaitu idea kebaikan. Maka sebuah negara harus memiliki keakuan untuk mewujudkan sebuah idea kebaikan yang tentu saja bagi Plato amat bergantung pada budi/rasio. Tujuan pemerintah yang benar menurutnya, adalah mendidik warga untuk mempunyai budi/rasio yang bersumber dari pengetahuan atau apa yang dia maksudkan sebagai *episteme*. Oleh karenanya, Plato menegaskan bahwa ilmu/pengetahuan haruslah 'berkuasa' di dalam suatu negara karena jika ilmu pengetahuan itu berkuasa, maka negara tidak akan sengsara. Akhirnya dari konsep teori Plato ini, dia menekankan bahwa sebelum filsuf menjadi raja maka kesengsaraan dunia (negara) tidak akan berakhir. Demikian sebaliknya, para raja harus menjadi filsuf demi sebuah kebaikan dalam negara. Demikian pun, jangan pernah berharap negara akan baik jika yang berkuasa tidak mengetahui tentang kebaikan, atau tidak berperilaku baik (Azar, 1999).

Berdasarkan pemikiran demokrasi Plato di atas, maka, sikap manusia yang menjunjung tinggi nilai etika dalam sebuah negara demokrasi adalah hal yang pokok. Sikap etik terutama oleh seorang pemimpin itu, akan menjadi fondasi masyarakat untuk berpijak. Oleh karenanya maka kita harus menjaga etika karena etika adalah hal penting dalam demokrasi. Di sisi yang sama, demokrasi bukan hanya ditujukan untuk mencipta sebuah kebebasan untuk berpendapat, tapi juga dalam setiap pendapat harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Etika wajib

hukumnya untuk menjadi pedoman atau bahkan orientasi masyarakat termasuk pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan.

Demokrasi Indonesia, Demokrasi Pancasila

Demokrasi secara singkat didefinisikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian pun, sebuah negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan pilihan rakyat, dan berdasar pada kedaulatan rakyat (Nufikha Ulfah, 2021). Pemahaman standar ini tentu saja tidak tanpa dasar. Kita perlu merujuk kepada sebuah fakta bahwa istilah "demokrasi" yang menjadi pijakan utama semua pemerhati demokrasi, merujuk kepada bagaimana pengambilan keputusan secara kolektif, di mana semua yang mengambil keputusan adalah setara.

Dalam kaitan dengan hal ini terdapat empat aspek yang perlu kita diperhatikan: *Pertama*, demokrasi berkaitan dengan pengambilan keputusan kolektif. Jadi keputusan itu dibuat oleh kelompok, untuk kelompok dan bertujuan untuk mengikatkan semua anggota kelompok dalam sebuah sistem yang disepakati bersama. *Kedua*, pengertian seperti ini dimaksudkan untuk mewadahi berbagai kelompok dan berbagai prosedur pengambilan sebuah keputusan yang demokratis. *Ketiga*, definisi tersebut tidak bertujuan untuk memberi standar bobot secara normatif, namun justru hal tersebut telah sesuai dengan definisi demokrasi. *Keempat*, kesetaraan yang disyaratkan oleh demokrasi adalah sebuah kesetaraan formal satu orang, yang memiliki satu suara dalam sebuah pemilihan wakil rakyat di parlemen. Jadi, demokrasi menunjuk pada pengaturan sebuah kelompok untuk mengambil keputusan yang langsung melibatkan anggota masyarakat dalam memutuskan hukum dan kebijakan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat berpartisipasi dalam memilih wakil-wakilnya untuk mengambil keputusan.

Kendati demikian, untuk mengurai tentang demokrasi di Indonesia kita juga perlu bertolak dari fakta bahwa demokrasi itu muncul dan mempengaruhi setiap perkembangan sebuah negara. Konsep demokrasi yang berkembang dalam alam pemikiran Yunani itu kemudian banyak berpengaruh terhadap sistem pemerintahan di Eropa, Amerika, Afrika dan termasuk Indonesia. Demokrasi pada saat ini telah dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang paling baik dibandingkan dengan sistem pemerintahan lain, seperti otokrasi, dan oligarki. (Philosophy, n.d.). Maka dari itu, demokrasi sesungguhnya secara konseptual lebih ditekankan pada sumber kekuasaan dibandingkan dengan cara memerintah. Di dunia Barat pada sekitar abad ke -19, ide demokrasi meliputi sistem perwakilan parlemen, hak-hak sipil dan politik lain seperti keinginan liberal. Indonesia pada masa itu dibawah sebuah kekuasaan asing yang

di negeri induknya menerapkan demokrasi, tetapi di negeri jajahan tidak demikian. (Wasino, 2009).

Dengan uraian diatas, dapat kita simpulkan beberapa poin berikut ini: *Pertama*, sejak kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mengujicoba beberapa model demokrasi. Pemahaman demokrasi dan praktek demokrasi juga diwarnai tarik-menarik antara satu budaya atau kebiasaan dalam kepemimpinan lokal dibandingkan dengan kepemimpinan yang bukan bersifat lokal tradisional. Budaya-budaya lokal/tradisional yang berakar pada kepemimpinan dan tata pemerintahan, diyakini telah turut menentukan cara pandang pemimpin untuk mempraktekkan sebuah sistem demokrasi. Demikian juga pengetahuan tentang demokrasi di berbagai negara, juga turut menentukan implementasi demokrasi di Indonesia. Namun apapun itu, konsep yang sangat Indonesia dalam arti sesuai dengan kultur di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang diyakini telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar ideologi Indonesia (Wasino, 2009).

Menilai sebuah sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus berpijak pada sebuah prinsip dasar dan utama yakni: ditegakkannya etika, integritas dan moralitas dalam pemerintahan. Etika, integritas dan moralitas ini harus menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan sebuah negara (Akademik, 2018)

Praktek Demokrasi Pancasila di Indonesia

Indonesia didirikan sebagai negara demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam lima prinsip sila Pancasila nomor empat, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Para Para pendiri negara ini menyadari bahwa masyarakat Indonesia masyarakat Indonesia yang heterogen, baik dari segi baik dari segi latar belakang etnis, budaya, maupun agama, dan mereka akan memiliki aspirasi yang berbeda-beda untuk berkembang. Oleh karena itu, negara ini harus dikelola bersama dengan mengoptimalkan partisipasi. Namun demikian, negara akan terjerumus pada konflik, kerusuhan, perang saudara, dan perang saudara, dan akan selalu disibukkan dengan mengamankan masyarakat, menjaga masyarakat dari gangguan kriminalitas. gangguan. Satu-satunya cara untuk mempromosikan dan memelihara hubungan yang harmonis, kekompakan dan rasa saling percaya di antara semua komunitas yang berbeda adalah partisipasi dan demokrasi (Rosada, 2017).

Dalam kerangka untuk menegaskan hal tersebut, kita perlu mengurai secara sepintas tentang demokrasi. Demokrasi adalah seperangkat ide dan prinsip-prinsip tentang kebebasan,

tetapi juga terdiri dari praktik dan prosedur yang telah dibentuk melalui sejarah yang panjang dan sering kali berliku-liku. Demokrasi adalah pelembagaan kebebasan. Pada akhirnya, orang-orang yang hidup dalam masyarakat demokratis harus berfungsi sebagai penjaga utama kebebasan mereka dan harus menempa jalan mereka menuju Hak Asasi Manusia: martabat yang melekat martabat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

Prinsip lain dari demokrasi Pancasila, seperti yang dinyatakan oleh Mohammad Hatta adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan, gotong royong rakyat untuk mencapai kesejahteraan sosial, berdasarkan kesejahteraan sosial, kesadaran beragama, berlandaskan kebenaran kebenaran, cinta kasih dan budi pekerti yang luhur dalam bingkai kepribadian Indonesia. Hatta, menekankan pentingnya pentingnya kebersamaan, cinta kasih, dan kerukunan hidup kehidupan yang harmonis di antara seluruh warga negara Indonesia, meskipun masyarakat memiliki latar belakang etnis, budaya, dan keyakinan yang berbeda, budaya, dan keyakinan yang berbeda (Rosada, 2017).

Senada dengan itu, Latif mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila memiliki ajaran luhur bahwa kebebasan individu tidak mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial, dan bahkan tujuan dari universalitas demokrasi adalah disintesis dengan tujuan-tujuan rakyat, yang selalu dijiwai oleh semangat persaudaraan, menghindari dominasi mayoritas dan selalu menghormati hak-hak minoritas. Di sisi yang sama, semua rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan daerah dijiwai oleh semangat untuk kemaslahatan umat sebagai bagian dari misi agama. Pemerintah pemerintah banyak hadir dalam kehidupan beragama masyarakat masyarakat dengan menyediakan sejumlah anggaran untuk membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan. Setiap agama memiliki doktrin, yurisprudensi, dan perilaku ritual yang yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mengatur beberapa saling menghormati, saling percaya, dan saling pengertian untuk menjaga saling pengertian untuk menjaga kehidupan yang harmonis dan mengembangkan stabilitas sosial untuk menjamin pelayanan administrasi pemerintahan, kegiatan bisnis kegiatan usaha, dan semua pekerjaan profesional untuk mencapai tujuan utama bangsa, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial (Rosada, 2017).

Akhirnya, demokrasi Pancasila sejatinya merujuk kepada sistem demokrasi yang diatur dan diimplementasikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Pancasila, yaitu ideologi dasar Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila dalam Pancasila

itu. Maka dari itu, demokrasi Pancasila menyiratkan bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Beberapa karakteristik dari demokrasi Pancasila melibatkan: Sila Pertama, mendasarkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat pada prinsip ketuhanan yang maha esa, yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas yang dipercayai. Sila kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, dan peradaban dalam interaksi antar warga negara. Sila ketiga, mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman, tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Sila keempat, menekankan pada partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui perwakilan maupun permuyaratan. Sila kelima, menekankan pentingnya mencapai kesetaraan dan keadilan sosial dalam distribusi sumber daya dan manfaat negara.

KESIMPULAN

Etika menjadi peran kunci untuk membangun serta memelihara sebuah demokrasi yang sehat. Relevansinya etika dalam sebuah negara demokrasi tampak jelas sangat relevan lewat beberapa hal berikut ini: Pertama, partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dalam proses demokratis. Dalam situasi ini, warga negara yang etis akan terlibat dalam kehidupan politik dengan cara mempromosikan kepentingan bersama dan mendukung keputusan yang diambil untuk kesejahteraan bersama. Hal terpenting kedua adalah, transparansi dan akuntabilitas. Terkait hal ini, etika sangat memerlukan transparansi dalam tindakan pemerintah serta setiap kebijakan publik. Dalam konteks demokrasi, pemerintahan yang transparansi dan akuntabel adalah landasan penting. Etika memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian yang tidak bisa kita lupakan adalah pemahaman tentang konsep keadilan dan kesetaraan yang jelas dan terukur. Etika menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks demokrasi, hal tersebut mengacu pada perlakuan adil terhadap semua warga negara dan pengakuan terhadap hak-hak dasar yang sama bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Keempat, penghormatan terhadap HAM. Etika menuntut penghormatan terhadap HAM.

Akhirnya dalam demokrasi, kita melibatkan etika untuk terutama melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara adil dalam proses politik. Oleh karena itu, di sisi yang sama, kita perlu berdialog dan memupuk sikap toleransi. Dalam kerangka itu, etika mendukung dialog dan toleransi sebagai cara untuk menangani perbedaan pendapat. Dalam konteks demokrasi, etika memastikan bahwa proses pengambilan keputusan melibatkan dialog terbuka, dan warga

negara mampu menghargai perbedaan pendapat tanpa kekerasan atau diskriminasi. Dengan mengikuti prinsip etika ini, masyarakat Indonesia dapat membangun dan memelihara sistem demokratis yang kuat, adil dan berkelanjutan. Etika berperan sebagai panduan moral untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya tentang proses politik formal, tetapi juga tentang prinsip-prinsip moral yang mendasarinya.

REFERENSI

- Akademik, T. P. (2018). *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. Bandung-Jakarta: Unpad-MPR RI.
- Azar, M. (1999). Filsafat Plato: Tentang Idea, Hermeneutika dan Internet. *Jurnal Idea Edisi ke 5*.
- Bertens, K. (2003). *Keprihatinan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Encyclopedia. (n.d.). *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Fiala, B. M. (2016: 116). *Ethics: Theory and Contemporary Issues, Ninth Edition*. Boston: Cengage Learning.
- Gunadi, I. (2017). *Konsep Estetika Franz Magnis Suseno*. Banda Aceh.
- Loho, A. M. (2020, Mei Kamis). *Kolom & Interaktif*. Retrieved from [Jejakpublik.com: https://jejakpublik.com/apakah-etika-kita-sudah-mulai-runtuh/](https://jejakpublik.com/apakah-etika-kita-sudah-mulai-runtuh/)
- Neni, Y. (2002). Implementasi Etika di Era Globalisasi. *Jurnal Mimbar Volume XVIII No 4*.
- Nufikha Ulfah, d. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan Volume 5 Nomor 2* .
- Philosophy, E. (n.d.). <https://plato.stanford.edu/entries/democracy/>.
- RI, M. (2001). *TAP MPR Nomor VI/MPR/2001*. Jakarta.
- Rici, d. (2021). Etika Kuliah Daring Seminari Tinggi San Giovanni XXIII dalam Perspektif Etika Franz Magnis Suseno. *Vocat: Jurnal Pendidikan Katolik Volume 1 Nomor 2* .
- Rosada, D. (2017). Model of Democracy in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 129 Third International Conference on Social and Political Sciences. ICSPS*. Jakarta .
- Saputra, N. P. (2023). Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua MK? *Info Singkat Volume XV. No. 22/II*.
- Sudarminta, J. (2013). *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. Yogyakarta : 2013.
- Suseno, F. M. (1987). *Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suseno, F. M. (2016). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wasino. (2009). Wajah Demokrasi. *Diskusi Sejarah Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Departemen Kebudayaan dan Pariwisata* . Semarang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.